

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya tujuan pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimum, meningkatkan kepuasan konsumen, mencapai pertumbuhan yang pesat serta menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pengendalian atas operasional perusahaan yang dapat dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan. Perusahaan kecil memiliki aktivitas yang sedikit dan sederhana, sehingga pimpinan perusahaan dapat mengendalikan semua aktivitas dan permasalahan yang dihadapinya. Namun pada saat perusahaan bertambah besar, maka pimpinan perusahaan tidak mungkin dapat mengendalikan secara menyeluruh aktivitas dan masalah yang timbul dalam perusahaan (Muharam, 2011). Untuk itu pimpinan harus mengadakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan di bawahnya (para pelaksana) dalam pengambilan keputusan sehingga masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat.

Lestari (2011) menyatakan bahwa dengan adanya pendelegasian tugas dan wewenang akan timbul berbagai tingkat tanggungjawab dan wewenang dalam suatu perusahaan. Dalam kondisi seperti ini perusahaan perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada di bawah pengawasannya (Sriwidodo, 2010). Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi di dalam pusat yang dipimpinnya dan secara periodik manajer tersebut akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan (Sriwidodo, 2010).

Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai untuk merekam seluruh aktifitas operasional perusahaan, mengetahui unit yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien. Dengan diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang

baik, maka diharapkan dapat tercipta suatu pengendalian dan pengukuran prestasi kerja manajer. Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer, sehingga dapat terbentuk suatu landasan terciptanya suatu sistem pengukuran prestasi kerja manajer. Hansen dan Mowen (2013) menjelaskan bahwa dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan, maka pimpinan dapat menilai tanggungjawab dan kinerja atau prestasi bawahan atas tugas yang didelegasikan kepadanya. Dengan demikian, tujuan perusahaan secara keseluruhan tercapai serta dapat tercipta sinergi antara kantor pusat dan kantor cabang (*branch office*) dalam menjalankan program kerja dan strategi-strategi yang telah direncanakan.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu alat dalam pengendalian manajemen. Untuk itu perlu diperhatikan efektivitas pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban agar efektivitas pengendalian manajemen dapat tercapai. Efektivitas akuntansi pusat pertanggungjawaban dapat tercapai jika akuntansi pusat pertanggungjawaban tersebut memenuhi beberapa syarat dan karakteristik tertentu. Mulyadi (2011) menyebutkan terdapat lima syarat yang harus dipenuhi sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi dan sistem pelaporan biaya. Lebih lanjut, Mulyadi (2011: 38) menjelaskan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban juga memiliki karakteristik antara lain : (1) adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, standar sebagai tolak ukur kinerja, (2) kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, (3) manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Di Indonesia, akuntansi pertanggungjawaban diterapkan oleh perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu BUMN yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah PT Pegadaian (Persero) yang memiliki 12 Kantor Wilayah dan 4.319 Kantor Cabang. Salah satu kantor cabang yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah Kantor Cabang Genteng Banyuwangi, yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi berada dibawah kendali PT Pegadaian

(Persero) kantor wilayah Surabaya. Pada saat ini PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng telah menerapkan dua pusat pertanggungjawaban yaitu pusat pendapatan dan biaya.

Dari survey pendahuluan tahun 2018 diketahui bahwa masih terdapat beberapa syarat dan karakteristik yang belum dipenuhi dalam akuntansi pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi, yaitu:

1. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng hanya diminta usulan anggaran namun tidak diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. Rencana kerja para manajer yang akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja sudah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Surabaya setiap tiga bulan sekali. Kondisi ini mengakibatkan pengeluaran PT Pegadaian (Persero) Cabang Genteng Banyuwangi terkadang melebihi anggaran karena sehingga berpengaruh terhadap laba perusahaan.
2. PT Pegadaian (Persero) Cabang Genteng Banyuwangi belum memisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan, sehingga pengukuran kinerja manajer menjadi kurang akurat karena masih memperhitungkan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer tersebut.
3. PT Pegadaian (Persero) Cabang Genteng Banyuwangi belum menerapkan sistem penghargaan atau hukuman dalam penilaian kinerja manajer. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi manajer dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Belum terpenuhinya setidaknya tiga syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya efektivitas pengendalian manajemen pada PT Pegadaian (Persero). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Akuntansi Pertanggungjawaban Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban yang ada di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi?
2. Apakah sistem pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi telah sesuai dengan syarat-syarat dan karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban di PT Pegadaian Kantor Cabang Genteng Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Kantor Cabang Genteng Banyuwangi telah sesuai dengan syarat-syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.

1.4. Kegunaan Penelitian adalah:

1. Secara Praktis
Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kelemahan pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Genteng Banyuwangi, sehingga pengendalian manajemen menjadi lebih efektif.
2. Secara Teoritis
 - a. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban dan dapat menjadi penambah wawasan bagi masyarakat luas.
 - b. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan pengalaman penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada kondisi sesungguhnya di suatu perusahaan. Sehingga terdapat kombinasi yang positif antara teori di dunia akademik dengan praktek di dunia usaha.